



Analisis Pengelolaan Keuangan Pada Kantor Dinas Perhubungan Kutacane (Dishub) Kutacane

Sophia Kharisah

Sekolah Tinggi Agama Islam Sepakat Segenap Kutacane, Indonesia

Email Korespondensi : sophiakharisah0961@yahoo.com

Abstract This study aims to determine how the financial management at the Kutacane Transportation Department office. Financial Management in question is Financial Management in accordance with public accounting standards. Data analysis was carried out using descriptive analysis techniques. The results of this study indicate that Financial Management has been assessed by the North Sumatra Provincial Transportation Office very much. Based on the percentage obtained from the calculation of the explanation above, 96.3% of the answers stated "Yes". While 3.7% of the interview answers stated "No", the authors concluded that the Financial Management at the North Sumatra Provincial Transportation Service Office (Dishub) Kutacane was very good.

Keywords: Financial Management, Consistency, Accountability, Transparency

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Pengelolaan Keuangan pada kantor Dinas Perhubungan Kutacane. Pengelolaan Keuangan yang dimaksud adalah Pengelolaan Keuangan yang sesuai standar akuntansi public yang. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Keuangan di telah pada dinilai Kantor Dinas Perhubungan Kutacane sangat Berdasarkan hasil persentase yang diperoleh dari perhitungan jawaban diatas yaitu 96,3% jawaban menyatakan "Ya". Sedangkan 3,7% jawaban wawancara menyatakan "Tidak" maka penulis menarik kesimpulan bahwa Pengelolaan Keuangan Pada Kantor Dinas Perhubungan Kutacane (Dishub) Kutacane sangat baik.

Kata Kunci : Pengelolaan Keuangan, Konsistensi, Akuntabilitas, Transparansi.

1. PENDAHULUAN

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat 3 menyatakan Standar Akuntansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah serta didalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat 4 menyatakan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat PSAP, adalah Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang diberi judul, nomor, dan tanggal efektif. Pernyataan Standar Akuntansi

Pemerintahan (PSAP) No. 07 atau biasa disingkat PSAP No. 07 adalah mengenai aset tetap. Tujuannya adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap, yang meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat aset tetap dan lainnya. PSAP No. 07 ini diterapkan keseluruh lembaga atau organisasi pemerintah dalam menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan perlakuan akuntansinya diantaranya pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.

Aset tetap merupakan salah satu pos di neraca di samping aset lancar, investasi jangka panjang, dana cadangan, dan aset lainnya. Secara umum pengertian aset tetap pemerintah adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Menurut PSAP No. 07 paragraf 5 mengartikan aset bahwa aset sebagai sumber daya ekonomi yang dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Menurut Halim & Kusufi (2012:45) disebut juga dengan sistem buku tunggal atau tata buku saja. Tetapi setelah terjadinya reformasi, pemerintah telah menetapkan standar akuntansi pemerintah, dimana pemerintah harus menyusun laporan keuangan yang lengkap sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah. Oleh karena itu, sistem pencatatan single entry sudah tidak diterapkan lagi dan beralih kepada sistem pencatatan double entry. Menurut Halim & Kusufi (2012:46) sistem pencatatan ini sering disebut dengan sistem tata buku berpasangan yang artinya suatu transaksi ekonomi akan dicatat dua kali, dimana ada sisi debit dan kredit.

Pengelolaan sumber sector publik merupakan hal yang sangat penting untuk diteliti dan dievaluasi khususnya dalam hal penyajian laporan keuangan.. Oleh karena itu tempat harus disadari dan dimaknai sebagai sebuah organisasi, karena setiap organisasi pasti memiliki tujuan yang akan dicapai.

Disini peneliti tertarik untuk meneliti tentang pengelolaan keuangan , yang mana indicator pengelolaan keuangan adalah konsistensi, akuntabilitas dan transparansi.

Konsistensi merupakan prinsip akuntansi yang menuntut diterapkannya standar secara terus-menerus, tidak diubah-ubah kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan. Perubahan kadang dimungkinkan dibenarkan agar laporan keuangan dapat menyajikan posisi keuangan organisasi yang sebenarnya dan untuk menghindari informasi yang menyesatkan. Ketidakkonsistenan dalam penyajian serta penyusunan laporan keuangan akan menyesatkan pemakaian laporan, juga berpengaruh bagi investor untuk mengambil keputusan dalam menginvestasikan dananya. Dan secara otomatis juga dapat mengurangi nilai perusahaan tersebut

Akuntabilitas pada organisasi peribadatan, pada organisasi public termasuk organisasi keagamaan, pengelola (pengurus dan pengawas) organisasi bertanggung jawab

kepada umat/warga atau rapat dengan warga masyarakat yang menggunakan organisasi keagamaan. Pertemuan ini diadakan secara berkala atau dalam waktu tertentu. Dalam melaksanakan akuntabilitas publik, organisasi sektor publik berkewajiban untuk memberikan informasi sebagai bentuk pemenuhan hak hak publik.

Transparansi pengelolaan keuangan merupakan tuntutan public yang harus direspon secara positif. Dan dengan dilakukannya transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang actual dan factual, sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk:

1. Membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan (realisasi dan anggaran),
2. Menilai ada tidaknya unsur korupsi dan manipulasi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran

Berdasarkan dari fenomena yang sudah disampaikan diatas, jelas bahwa Kantor Dinas Perhubungan Kutacane belum terkelola Akuntansi dengan baik mengenai penerapan standar akuntansi dan belum memenuhi asas tata cara dalam bentuk penyajian laporan keuangan yang tepat. Permasalahan seperti ini sebaiknya segera diatasi dan dimaksimalkan agar lebih baik lagi kedepannya sehingga dapat sesuai dengan sistem akuntansi yang sebagaimana seharusnya. Jika hal ini diatasi tentunya menimbulkan suasana nyaman dan kondusif sehingga karyawan dapat melakukan tanggung jawab pekerjaannya dengan baik dan optimal. Maka dari itu peneliti tertarik dan melakukan penelitian sebagai hasil magang, dengan judul “Analisis Pengelolaan Keuangan Pada Kantor Dinas Perhubungan Kutacane(Dishub) Kutacane”

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas maka penulis, dapat merumuskan masalah pada penelitian sebagai hasil magang ini, yaitu Bagaimana Pengelolaan Keuangan Pada Kantor Dinas Perhubungan Kutacane(Dishub) Kutacane.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian sebagai hasil magang yang dilakukan penulis ialah untuk menganalisis laporan penerimaan dan pengeluaran pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.

Manfaat dari kegiatan penelitian ini yaitu:

1. Bagi Dinas Perhubungan

Sebagai salah satu informasi bagi dinas perhubungan Sumatera Utara untuk menilai kondisi keuangan dan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan keuangan.

2. Bagi Peneliti

Merupakan sasaran untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diterima penulis keuangan pemerintah dan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan keuangan.

3. Bagi Akademik

Praktek kerja lapangan diharapkan berguna bagi perkembangan calon sarjana dan dapat menjadi promosi bagi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara khususnya Akuntansi Syari'ah untuk mempererat kerja sama antara kampus dan perusahaan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Konsistensi (*Concistency Principle*)

Konsep ini menghendaki penggunaan metode-metode secara tepat dari satu periode ke periode selanjutnya. Jika terpaksa diadakan perubahan untuk member manfaat pada laporan keuangan. Konsistensi (*Consistency*) adalah sistem dan kebijakan keuangan dari organisasi harus konsisten dari waktu ke waktu. Ini tidak berarti bahwa sistem keuangan tidak boleh disesuaikan apabila terjadi perubahan di organisasi. Pendekatan yang tidak konsisten terhadap manajemen keuangan merupakan suatu tanda bahwa terdapat manipulasi di pengelolaan keuangan.

Konsistensi merupakan prinsip akuntansi yang menuntut diterapkannya standar secara terus-menerus, tidak diubah-ubah kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan. Perubahan kadang dimungkinkan dibenarkan agar laporan keuangan dapat menyajikan posisi keuangan organisasi yang sebenarnya dan untuk menghindari informasi yang menyesatkan. Ketidakkonsistenan dalam penyajian serta penyusunan laporan keuangan akan menyesatkan pemakaian laporan, juga berpengaruh bagi investor untuk mengambil keputusan dalam menginvestasikan dananya. Dan secara otomatis juga dapat mengurangi nilai perusahaan tersebut.

2.2 Indikator konsistensi

- 1) Konsistensi merupakan prinsip akuntansi yang menuntut diterapkannya standar secara terus-menerus, tidak diubah-ubah kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan. Jadi indikatornya adalah standar akuntansi yang diterapkan.
- 2) Penyajian laporan keuangan sesuai standar akuntansi.
- 3) Penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi.

2.3 Konsep akuntabilitas

2.3.1 Pengertian akuntabilitas

Akuntabilitas umumnya terkait dengan pemberian hadiah. Akuntabilitas sebagai kewajiban untuk menjelaskan dan menjustifikasi suatu perbuatan atau keputusan yang diakibatkan oleh diskresi yang dimiliki seorang individu.

Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban seseorang atau untuk organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengendalian dan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik.

Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Prinsip akuntabilitas merupakan pilar penting dalam rangka mencegah terjadinya korupsi. Prinsip ini pada dasarnya dimaksudkan agar kebijakan dan langkah-langkah atau kinerja yang dijalankan sebuah lembaga dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu akuntabilitas membutuhkan perangkat-perangkat pendukung, baik berupa perundang-undangan maupun dalam bentuk komitmen dan dukungan masyarakat, baik pada level budaya (individu) maupun level lembaga.

2.3.2 Prinsip-prinsip Akuntabilitas

prinsip-prinsip akuntabilitas. yaitu sebagai berikut:

- 1) Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk melakukan pelaksanaan misi agar akuntabel.
- 2) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menajmin penggunaansumberdaya secara konsisten.
- 3) harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
- 4) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan saran manfaat yang ditetapkan.
- 5) Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan dan manajemen organisasi dalam bentuk pemuktahiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Untuk meningkatkan akuntabilitas tersebut, paling tidak tiga hal berikut terkait dengan interaksi antara pejabat dan public harus terpenuhi.

- 1) Pejabat berkewajiban untuk melaporkan akuitivitasnya kepada public.
- 2) Publik (melalui perwakilannya) mempunyai hak untuk menanyakan lebih lanjut apabila terdapat data atau informasi yang belum cukup.
- 3) Publik melalui wakilnya mempunyai kekuasaan untuk menilai laporan tersebut, meliputi menerima atau menolak laporan, mengkritisi kebijakan, dan secara terbuka mengkritisi pejabatbersangkutan.

Variable yang mempengaruhi sukses tidaknya penerapan akuntabilitas diantaranya.

- 1) Transparan, yaitu keterbukaan bagi public untuk menyelidiki, mengkritis dan menganalisis kebijakan public.
- 2) Akses, yaitu adanya akses bagi public terhadap informasi yang relevan, kapanpun, dimanapun, oleh siapapun dengan biaya yang sangat rendah.
- 3) Rensponsiveness, yaitu kecepatan dalam melakukan follow up atas kritik, masukan, dan pendapat dari public.
- 4) kontrol, yaitu berfungsinya control yang ada dalam masyarakat medi, NGO, dll terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip akuntabilitasoleh pejabat public.
- 5) Tanggungjawab, yaitu tanggungjawab pegawai dan pejabat publik untuk bekerja secara professional sesuai dengan standard dan kode etik yang berlaku.

Secara sederhana, formula untuk membangun akuntabilitas:

Akuntabilitas = f {transaparansi, akses informasi, responsiveness,control, tanggungjawab}

2.3.3 Indikator Akuntabilitas

- 1) Transaparansi
- 2) Akses informasi
- 3) Responsiveness,
- 4) Kontrol,
- 5) Tanggungjawab

2.4 Konsep Transparansi

2.4.1 Pengertian transparansi

Transparansi adalah keterbukaan dalam pelaksanaan proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi materil yang relevan mengenai perusahaan.

2.4.2 Prinsip-prinsip transparansi

Prinsip pokok pelaksanaan transparansi adalah sebagai berikut:

- 1) Menyediakan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi mengenai aktifitas-aktifitas yang dijalankan dalam organisasi tersebut.
- 2) Informasi harus diungkap secara lengkap, antara lain meliputi visi, misi, kondisi keuangan, susunan pengurus, bentuk perencanaan dan hasil dari kegiatan kepada masyarakat maupun donator. Harus bersikap terbuka, mudah diakses, diterbitkan secara teratur dan mutakhir.
- 3) Adanya media untuk menyampaikan pendapat, saran dan kritik, terhadap perbaikan kondisi kinerja atau kegiatan yang lebih baik dan terarah.

2.4.3 Indikator transparansi

- 1) Menyediakan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi mengenai aktifitas-aktifitas yang dijalankan dalam organisasi tersebut. Yang mana dalam konsep transparansi keuangan adalah informasi keuangan
- 2) Informasi harus diungkap secara lengkap, antara lain meliputi visi, misi, kondisi keuangan, susunan pengurus, bentuk perencanaan dan hasil dari kegiatan kepada masyarakat maupun donator. Harus bersikap terbuka, mudah diakses, diterbitkan secara teratur dan mutakhir. Yang mana dalam konsep transparansi keuangan adalah publikasi organisasi sector public
- 3) Adanya media untuk menyampaikan pendapat, saran dan kritik, terhadap perbaikan kondisi kinerja atau kegiatan yang lebih baik dan terarah.

2.5 Hubungan Konsistensi, Akuntabilitas Tranparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan

Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan alat organisasional, seperti dalam hal pengelolaan keuangan adalah akuntansi. Disini peneliti tertarik untuk meneliti tentang pengelolaan keuangan , yang mana variabel yang akan diujia adalah konsistensi, akuntabilitas dan transparansi

Konsistensi merupakan prinsip akuntansi yang menuntut diterapkannya standar secara terus-menerus, tidak diubah-ubah kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan. Perubahan kadang dimungkinkan dibenarkan agar laporan keuangan dapat menyajikan posisi keuangan organisasi yang sebenarnya dan untuk menghindari informasi yang menyesatkan. Ketidakkonsistenan dalam penyajian serta penyusunan laporan keuanganakan menyesatkan

pemakaian laporan, juga berpengaruh bagi investor untuk mengambil keputusan dalam menginvestasikan dananya. Dan secara otomatis juga dapat mengurangi nilai perusahaan tersebut

Akuntabilitas pada organisasi peribadatan, pada organisasi public termasuk organisasi keagamaan, pengelola (pengurus dan pengawas) organisasi bertanggung jawab kepada umat/warga atau rapat dengan warga masyarakat yang menggunakan organisasi keagamaan. Pertemuan ini diadakan secara berkala atau dalam waktu tertentu. Dalam melaksanakan akuntabilitas publik, organisasi sektor publik berkewajiban untuk memberikan informasi sebagai bentuk pemenuhan hak hak publik.

Transparansi pengelolaan keuangan merupakan tuntutan public yang harus direspon secara positif. Dan dengan dilakukannya transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang actual dan factual, sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk:

- a) Membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan (realisasi dan anggaran),
- b) Menilai ada tidaknya unsur korupsi dan manipulasi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran

3. METODE PENELITIAN

3.1 Sumber Data

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihaklain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan (Indriantoro dan Supomo, 2014:147). Dalam penelitian ini data sekunder yang diperlukan antara lain gambaran umum mengenai Dinas Perhubungan kota Kutacane tersebut, serta data-data lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Dokumentasi

Dokumentasi berkaitan dengan suatu kegiatan khusus berupa pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebaran suatu informasi. Dokumentasi adalah semua kegiatan yang berkaitan dengan photo, dan penyimpanan photo.

Pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan. Kumupulan bahan atau dokumen yang dapat digunakan sebagai asas bagi sesuatu kejadian, penghasilan sesuatu terbitan.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan pencatatan yang bersumber dari dokumen, dan laporan hasil dari anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja Daerah yang diperlukan oleh peneliti.

2. Wawancara

Dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Menurut Patton dalam proses wawancara dengan menggunakan pedoman umum wawancara ini, interview dilengkapi pedoman wawancara yang sangat umum, serta mencantumkan isu-isu yang harus diliput tanpa menentukan urutan pertanyaan, bahkan mungkin tidak terbentuk pertanyaan yang eksplisit.

Dalam hal ini penulis menanyakan secara langsung kepada bagian yang terkait atau berhubungan dengan hasil dari anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja kantor .

Yang mana bagian yang berhubungan tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- a. Bidang ekonomi
- b. Bendahara

3.3 Teknik Analisa Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif komparatif yaitu dengan terlebih dahulu mengumpulkan data yang ada, kemudian mengolah, menganalisis, selanjutnya menginterpretasikan penerapan akuntansi persediaan dan akuntansi aset tetap Badan Pengelolah Keuangan Daerah dengan standar yang berlaku. Sehingga dapat memberian gambaran yang sebenarnya tentang akuntansi sektor publik di Dinas Perhubungan kota Kutacane

Metode teknik analisis data menggunakan metode deskriptif pendekatan kuantitatif yang merupakan metode yang digunakan untuk merumuskan perhatian terhadap masalah yang dihadapi, dimana data yang dikumpulkan, disusun dan dianalisis sehingga dapat memberikan informasi masalah yang ada. Adapun teknik analisa data dapat dilakukan dengan beberapa tahap yaitu:

1. Mengumpulkan data penelitian yang dilakukan berupa Anggaran dan Realisasi APBD kantor) tahun 2015 sampai tahun 2020.
2. Menguraikan sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang kantor tahun 2015 sampai tahun 2020.
3. Menganalisis dan membahas kinerja keuangan kantor.
4. Menyaring keterangan-keterangan yang masuk secara menyeluruh dan detail tentang pencatatan dan pelaporan kantor askot mandiri program tanpa kumuh (PUPR) tahun 2015 sampai tahun 2020. Penelitian ini mendeskripsikan pencatatan dan pelaporan keuangan oleh kantor Melalui teknik wawancara dengan daftar checklist. Untuk keperluan interpretasi hasil jawaban yang dikumpulkan dari hasil wawancara dengan menggunakan daftar *checklist* dimana pilihan jawaban yang disajikan adalah Ya dan Tidak dimana jawaban Ya=1 dan Tidak =0. Dan untuk menghitung persentase jawaban yang diperoleh dengan menggunakan Dean J.Champion mengemukakan sebagai berikut :
 - a. 0%-25% : berarti pencatatan dan pealporan keuangan kantor tidak baik
 - b. 25%-50% : berarti pencatatan dan pealporan keuangan kantor kurang baik
 - c. 50%-75% : berarti pencatatan dan pealporan keuangan kantor cukup baik
 - d. 75%-100% : berarti berarti pencatatan dan pealporan keuangan kantor sangat baik
5. Menarik kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan akuntansi pada dinas Perhubungan kota Kutacane mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang saat ini sudah disempurnakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2007. Penelitian yang dilakukan Syafitri (2012) pada pemerintah Kota Palembang, menyatakan bahwa penerapan akuntansi telah dilakukan sesuai dengan PP No.24 tahun 2005, yang sekarang diubah menjadi PP No.71 tahun 2010. Hal ini berarti, bahwa pemerintah kota Kutacane dan pemerintah kota khususnya pada dinas Perhubungan sudah menerapkan akuntansi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sama-sama menyajikan laporan keuangan dengan baik.

Sistem dan prosedur belanja modal yang dilakukan oleh dinas perhubungan adalah menggunakan mekanisme belanja langsung (LS). Dalam mekanisme belanja langsung, pembayarannya melibatkan pihak ketiga. Dimana pembayaran dikeluarkan langsung dari rekening kas umum daerah dan di transfer langsung ke rekening pihak ketiga, berdasarkan SP2D yang telah dikeluarkan oleh kuasa BUD. Penelitian yang dilakukan Tampanatu (2013) menjelaskan bahwa pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil sudah menerapkan akuntansi belanja dengan menggunakan mekanisme belanja langsung (LS), yang artinya pemerintah telah menerapkan mekanisme belanja langsung pada tiap-tiap SKPD.

Basis akuntansi yang digunakan dalam penerapan akuntansi belanja modal pada dinas Perhubungan adalah basis kas. Hal ini sejalan dengan PP No.71 tahun 2010 yang menyatakan Basis Akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan SKPD adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah atau entitas pelaporan. Sedangkan Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Belanja modal yang direalisasikan oleh dinas Perhubungan, merupakan belanja untuk memperoleh aset tetap. Oleh karena itu pengakuan untuk aset tetap diakui pada saat barang tersebut diperoleh dan diterbitkannya SP2D-LS. Untuk pengukuran aset tetap yang berasal dari belanja modal tersebut, digunakan metode nilai perolehan. Penerapan akuntansi untuk belanja modal pada dinas Perhubungan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku umum, dalam hal ini adalah PP No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri No.13 tahun 2006. Meskipun begitu, dinas Perhubungan harus memberlakukan Akuntansi Depresiasi atau Penyusutan atas Aset tetap sampai dengan penyusunan Neraca, karena pada Neraca per 31 Desember 2013 tidak di tampilkan akumulasi penyusutan atas aset tetap. Oleh karena itu untuk menyempurnakan penyajian laporan keuangan, dinas Perhubungan kota Kutacane kiranya memberlakukan akuntansi depresiasi atau penyusutan atas aset tetap.

A. Konsistensi

1. Dalam menyusun Laporan Keuangan di Kantor Dinas Perhubungan Kutacane standar akuntansi apakah yang digunakan?

Ya Isak 35

3. Apakah prinsip kinerja yang ada pada Kantor Dinas Perhubungan Kutacane disini telah sesuai dengan prosedur yang berlaku (otorisasi dan SOP)?

Menurut hasil penelitian sesuai

4. Apakah Sistem akuntansi yang diterapkan oleh Kantor Dinas Perhubungan Kutacane sesuai dengan Standar Akuntansi sector public ?

Hasil wawancara menunjukkan sesuai

5. Apakah Sistem akuntansi yang diterapkan oleh Kantor Dinas Perhubungan Kutacane sudah sesuai dengan Standar ISAK 35: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 26 September 2018 ?
sesuai

6. Apakah Kantor Dinas Perhubungan Kutacane mengikuti suatu kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan sesuai dengan Standar ISAK 35 ?

Hasil wawancara menunjukkan sesuai ya di kantor Kantor Dinas Perhubungan Kutacane

7. Apakah Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan sector publik yang diterapkan oleh Kantor Dinas Perhubungan Kutacane sudah baik ?

Hasil wawancara menunjukkan sesuai ya sudah baik di kantor Kantor Dinas Perhubungan Kutacane

8. Apakah di Kantor Dinas Perhubungan Kutacane menyajikan informasi dana dengan membedakan antara Administrasi dan Laporan Operasional Keuangan Kantor Dinas Perhubungan Kutacane (unit usaha lain) ?

Ya, Di Kantor Dinas Perhubungan Kutacane ini cuman pelaporannya memisahkan antara Administrasi dan Laporan Operasional Keuangan

9. Apakah pembuatan laporan keuangan dilakukan setiap periode akuntansi. ?

Hasil wawancara menunjukkan sesuai ya dilakukan setiap periode akuntansi di kantor Kantor Dinas Perhubungan Kutacane

10. Apakah pelaporan Laporan keuangan dilakukan secara konsisten dan periodik. ?

Hasil wawancara menunjukkan ya dilakukan di kantor Kantor Dinas Perhubungan Kutacane

B. Akuntabilitas

1. Apakah di antara Administrasi dan Laporan Operasional Keuangan memiliki rincian tugas dan tanggungjawab karyawan secara jelas yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai organisasi, dan strategi organisasi?

Ya, di Kantor Dinas Perhubungan Kutacane ini memiliki rincian tugas dan tanggungjawab karyawan secara jelas.

2. Apakah Kantor Dinas Perhubungan Kutacane telah menggunakan tenaga yang kompeten terkait pengelolaan keuangan?

Ya, Kantor Dinas Perhubungan Kutacane telah menggunakan tenaga yang kompeten terkait pengelolaan keuangan masjid karena bagian pengelolaan keuangan diberikan fasilitas kursus komputer akuntansi agar penyajian laporan keuangannya lebih baik dari sebelumnya yang hanya mencatat dalam buku kas.

3. Apakah Laporan Keuangan Kantor Dinas Perhubungan Kutacane sudah pernah di Audit ?

ya pernah,

4. Apakah transaksi keuangan pada Kantor Dinas Perhubungan Kutacane dilakukan dengan analisis transaksi/identifikasi transaksi. Hasil wawancara menunjukkan

Hasil wawancara menunjukkan ya dilakukan di kantor Kantor Dinas Perhubungan Kutacane

5. Apakah Kantor Dinas Perhubungan Kutacane melaksanakan pengidentifikasian terhadap pencatatan.

Hasil wawancara menunjukkan ya dilakukan di kantor Kantor Dinas Perhubungan Kutacane

6. Apakah setiap transaksi keuangan pada Kantor Dinas Perhubungan Kutacane didukung oleh bukti transaksi.

Hasil wawancara menunjukkan ya dilakukan di kantor Kantor Dinas Perhubungan Kutacane

7. Apakah di Kantor Dinas Perhubungan Kutacane semua transaksi keuangan dilakukan pencatatan secara kronologis ?

Hasil wawancara menunjukkan ya dilakukan di kantor Kantor Dinas Perhubungan Kutacane

8. Apakah Kantor Dinas Perhubungan Kutacane melakukan klasifikasi atas transaksi sesuai dengan pos masing-masing ?

Hasil wawancara menunjukkan ya dilakukan di kantor Kantor Dinas Perhubungan Kutacane

9. Apakah Penyajian laporan keuangan tepat waktu sesuai periode akuntansi.

Hasil wawancara menunjukkan ya dilakukan di kantor Kantor Dinas Perhubungan Kutacane

C. Transparansi

1. Apakah di Kantor Dinas Perhubungan Kutacane ini berbagi informasi melalui media cetak atau media elektronik?

Ya, Kantor Dinas Perhubungan Kutacane berbagi informasi baik surat kabar, internet dll tentang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan lain sebagainya.

2. Apakah Informasi pengelolaan Laporan Keuangan dapat diakses dengan mudah oleh pihak yang berkepentingan tanpa harus datang ke Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara?

Belum bisa,

3. Apakah laporan keuangan menyediakan informasi yang dapat mengoreksi aktifitas keuangan dimasa lalu.

Hasil wawancara menunjukkan ya dilakukan di kantor Kantor Dinas Perhubungan Kutacane

4. Apakah laporan keuangan menyediakan informasi yang mampu memprediksi masa yang akan datang. Jawabanya ya
5. Apakah laporan keuangan menghasilkan informasi yang lengkap mencakup semua informasi yang dibutuhkan guna pengembalian keputusan.
6. Apakah laporan keuangan menghasilkan informasi yang wajar dan jujur. Hasil wawancara menunjukkan ya
7. Apakah laporan keuangan menghasilkan informasi yang dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa ya dapat dibandingkan

8. Apakah laporan keuangan yang dihasilkan Kantor Dinas Perhubungan Kutacane sudah disajikan dalam bentuk dan istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Hasil wawancara menunjukkan ya dilakukan di kantor Kantor Dinas Perhubungan Kutacane

Untuk menghitung persentase tingkat kesesuaian berdasarkan Rumus Dean

J. Champion yaitu :

$$\text{Persentase} = \frac{\sum \text{Jumlah Jawabanya}}{\sum \text{Jumlah Jawaban Penelitian}} \times 100$$

$$\text{"Ya"} = \frac{1}{27} \times 100 = 3,7\%$$

$$\text{"Tidak"} = \frac{26}{27} \times 100 = 96,3\%$$

Berdasarkan hasil persentase yang diperoleh dari perhitungan jawabandiatas yaitu 96,3% jawaban menyatakan "Ya". Sedangkan 3,7% jawaban wawancara menyatakan "Tidak" maka penulis menarik kesimpulan bahwa Pengelolaan Keuangan Pada Kantor Dinas Perhubungan Kutacane(Dishub) Kutacane sangat baik.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian - uraian yang telah penulis paparkan baik dari data - data maupun informasi peneliti kemudian dianalisis mengenai Kantor Dinas Perhubungan Kutacanesaya memberikan beberapa saran berikut:

Pengelolaan Keuangan Pada Kantor Dinas Perhubungan Kutacane(Dishub) Kutacane sangat baik telah dinilai sangat baik. Terhindar dari kasus-kasus yang umum terjadi yaitu sebagai berikut.

1. Pencatatan tidak/belum dilakukan secara akurat.
2. Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan yang mana itu ISAK 35
3. Keterlambatan menyampaikan laporan
4. Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai
5. Sistem informasi dan pelaporan belum didukung SDM yang berkualitas.

Agar kualitas Pengelolaan Keuangan Pada Kantor Dinas Perhubungan Kutacane(Dishub) tetap memiliki kualitas yang baik, disarankan agar membuat pelatihan khusus kepada pegawai yang berwenang dalam hal keuangan dan disarankan juga lebih mengutamakan pegawai yang berpendidikan akuntansi/ekonomi yang menjadi pegawai dalam urusan keuangan di Pada Kantor Dinas Perhubungan Kutacane(Dishub), karena pendidikan tersebut sudah memiliki besik mengenai hal keuangan dan agar kendala - kendala seperti keterlambatan tidak terulang kembali dan tidak perlu lagi badan keuangan turun tangan untuk menyelesaikan laporan keuangan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Sugiyono. (2009). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Nur Adilla, et al. (2021). The influence of religiosity and income on zakat awareness and interest in paying zakat. Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE), 4(1), 62-76.
- Madris, N. N. (2014). Akuntabilitas dan keuangan masjid di kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene. ASSETS, 4.
- Insani, I. (2010). Pengembangan kapasitas sumber daya manusia daerah dalam rangka peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

- Ikhsan, A., et al. (2014). Metodologi penelitian bisnis untuk akuntansi dan manajemen. Bandung: Ciptapustaka Media.
- Ikhsan, A. (2012). Metodologi penelitian. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (n.d.). PSAK 109 Akuntansi zakat dan infak/sedekah.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). Teori, konsep, dan aplikasi akuntansi sektor publik dari anggaran hingga laporan keuangan dari pemerintah hingga tempat ibadah. Jakarta: Salemba Empat.
- Endang. (2017). Penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan Masjid Jamik An-Nur Sekayu. Jurnal ACSY Politeknik Sekayu, 6.
- Effendi, M. A. (2009). The power of good corporate governance teori dan implementasi. Jakarta: Salemba Empat.
- Dicky. (2009). 7 prinsip manajemen keuangan. Retrieved from <http://blasterlog.blogspot.co.id/2009/07/7-prinsip-manajemen-keuangan.html>. Accessed April 21, 2018.
- Departemen Agama. (2011). Al-Qur'an dan terjemahan. Bogor: SABIQ.
- Bi rahmani, N. A. (2021). Metodologi penelitian ekonomi. Kutacane: Rahmani Percetakan.
- Beastudi. (2016). Konsistensi penyajian laporan keuangan. Retrieved from <https://www.beastudiindonesia.net/konsistensi-penyajian-laporankeuangan/>. Accessed April 21, 2018.
- Bastian, I. (2010). Akuntansi lembaga swadaya masyarakat dan partai politik. Jakarta: Salemba Empat.
- Asdar, et al. (2014). Phenomenological study of financial accountability of mosque. IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF), 5.
- Ahyaruddin, M., et al. (2017). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan masjid di Kota Pekanbaru. Jurnal Pengabdian Untuk Mu Negeri, 1.
- Adil, M. A. M. (2013). Financial management practices of mosques in Malaysia. Global Journal Al-Thaqafah (GJAT), 3.